

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Amiq Bachrul, 2013, *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediautama, Yogyakarta

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), 2018, *Fenomena Calon Tunggal Studi Kasus di 16 Kabupaten/Kota*, Bawaslu RI, Jakarta.

George Sorensen, 2014, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Berubah)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Irfan Fachrudin, 2003, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta

John Braithwaite, 1989 , *Crime, Shaming and Reintegrative*, Cambridge University Press, Melbourne.

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Joko J. Prihatmoko dan Moesafa, 2008, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Yogyakarta, Pustaka Belajar,

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Luki Sandra Amalia, et.al. 2016, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Marshal NG, et.al., 2018, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Tunas Gemilang Press, Palembang.

Muhammad Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara*

Indonesia, PSHTNFHUI, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, et.al., 2019, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, PT Itra Aditya Bakti.

Ramlan Surbakti, et.al., 2008, Perencanaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Jakarta, Kemitraan,

Riawan Tjandra, 2019, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta.

Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, Politik Ketatanegaraan, LabHukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Tjahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, PT Mizan Republika, Jakarta

UU Nurul Huda, 2018, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Fokusmedia, Bandung.

2. Jurnal

Agus Hadiawan, “*Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung)*”, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol. 3, No. 7, 2009

Agus Pramusinto, “*Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Menceermati Hasil Pemilu 2004*”, Jakarta, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No. 2, 2004

A. Habib Amanatullah Rahdar, Sohrah, “*Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Bawaslu Kota Makassar Dalam Sengketa Pilwali Kota Makassar Tahun 2018*”. Jurnal Siyasatuna, Volume 1 Nomor 3, (2020),

Happy Hayati Helmi, Anna Erliyana, "Konstruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah". *Pakuan Law Review*, Volume 5 Nomor 2, 2019

Hariato, Wawan Budi Darmawan, Muradi, "Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018". *Society*, Volume 8 Nomor 2, 2020

Irvan Mawardi, "Pengujian Administrasi terhadap Proses Diskualifikasi Petahana Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, 2018

Kadek Endra Setiawan, Ni Putu Noni Suharyanti, "Denda Administrasi Sebagai Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Prokers Menurut Pergub Bali No. 46/2020", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 2, 2021

Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. - Nomor -, 2018

Muhammad Anwar Tanjung, Retno Saraswati, "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi, Semarang", *Jurnal Yudisial* Vol. 12, No.3, 2019

Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 Nomor 1, 2018

Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, 2019

Tony Yuri Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten". *Jurnal HAM*, Volume 9 Nomor 2, 2018

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Komisi Pemilu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 06 P/PAP/2018

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHP.KOT-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/PILKADA/2018/ PTTUN.MKS

Putusan Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar Nomor 001/PWSL-MKS/27.01/II/2018

Putusan Panitia Pengawasan Pemilu Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018

4. Karya Ilmiah

Defi Permata Sari, Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum dan Keadilan, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang

Dian Hidayat, 2019, Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Makassar Pada Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syariah), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar

Andi Arya Batara, 2017, Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Perusahaan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Irham fauzi, 2011, Permasalahan yang Timbul pada Pilkada, Paper, Jurusan Teknik Informatika STIMIK AMIKOM Yogyakarta, Yogyakarta

5. Internet

Hendra Cipto, *KPU Tetapkan Danny-Fatma Pemenang Pilkada Makassar 2020*, diakses dari

<https://makassar.kompas.com/read/2020/12/15/21465671/kpu-tetapkan-danny-fatma-pemenang-pilkada-makassar-2020?page=all>

pada tanggal 25 Januari 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses dari

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan>. pada tanggal 1 Maret 2020

Irwan Kahir, *Belum Menyerah, DIAMI Layangkan Dua*

Gugatan, diakses dari <https://fajar.co.id/2018/05/04/belum-menyerah-diami-layangkan-dua-gugatan/> pada tanggal 26 Juni 2020

Hendra Cipto, *Kotak Kosong Menang Pilkada Makassar Akan Digelar pada 2020*, diakses dari

<https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/13513741/kotak-kosong-menang-pilkada-makassar-akan-digelar-pada-2020>

pada

tanggal 23 Juni 2020

Alfian, *Ini 3 Alasan KPU Makassar Tolak Jalankan Putusan Panwaslu*,

diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2018/05/17/ini-3-alasan-kpu-makassar-tolak-jalankan-putusan-panwaslu>. pada tanggal 23 Juni 2020

Sahrul Ramadan, *Danny-Fatma Ditetapkan Sebagai Paslon Terpilih Pilkada Makassar*,

diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sahrul-ramadan-1/danny-fatma-ditetapkan-sebagai-paslon-terpilih-pilkada-makassar-nasional>

pada tanggal 25 Januari 2021

Ashrawi Muin, *Nurdin Puji Danny Pomanto pada Pelantikan Walikota Makassar*,

diakses dari <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/nurdin-puji-danny-pomanto-pada-pelantikan-wali-kota-makassarbr/3>

pada tanggal

20 April 2021

M. Darwin Fatir, *KPU Makassar kembalikan sisa anggaran Pilkada Rp 18,4 Miliar*,

diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2114562/kpu-makassar-kembalikan-sisa-anggaran-pilkada-rp184-miliar>,

pada tanggal 15 Mei

2022 pada pukul 23.00 WIB



Evaluasi Penjatuhan Sanksi Pembatalan Calon yang Mengakibatkan Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal

(Studi Kasus Pilkada Kota Makassar Tahun 2018)

Muhammad Khatami Ali Jusfa, Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>